



## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu melakukan perbaikan dalam segi pembangunan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Untuk melakukan pembangunan secara terus menerus, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak itu sendiri.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara yang berdasarkan UU yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung. Pajak sendiri memiliki banyak jenis, akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus pada jenis Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dikarenakan PBB merupakan salah satu sumber dana yang berkontribusi besar dalam pembangunan negara yang sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu UU No. 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah belum optimalnya penerimaan dari sektor PBB itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan PBB tiap tahunnya diberbagai daerah serta realisasi penerimaan PBB yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu alasannya yaitu masih bermasalahnya partisipasi masyarakat sehingga masih perlu ditingkatkan. Indikasi masih bermasalahnya partisipasi masyarakat yaitu adanya perasaan terbebani yang dirasakan oleh wajib

pajak, serta masih seringnya wajib pajak mengulur-ngulur waktu dalam membayar PBB.

Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat juga dialami oleh Kecamatan Kota Kudus, di mana banyak masyarakat yang selalu mengulur waktu dengan berbagai alasan. Salah satunya saat terjadi keterlambatan pendistribusian SPPT PBB, ketika petugas ingin memberikan informasi wajib pajak justru tidak peduli dengan informasi yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa, komunikasi yang terjalin antara petugas pajak dan wajib pajak belum berjalan secara efektif, dikarenakan belum adanya timbal balik dari wajib pajak terkait informasi yang diberikan. Inilah yang harus diperbaiki dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB pada tahapan komunikasinya. Komunikasi yang ditekankan di sini lebih kepada komunikasi antar pribadi yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beberapa timbal balik. (Hardjana, 2007:84)

Permasalahan lain terkait dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kota Kudus yaitu dilihat dari tingkat sosial ekonomi. Masih seringnya wajib pajak menunda membayar pajak dikarenakan alasan ekonomi. Selain itu, sebagian besar wajib pajak memiliki tanggungan keluarga yang banyak sehingga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga wajib pajak itu sendiri. Apalagi ditambah dengan mayoritas penduduk di Kecamatan Kota Kudus memiliki pekerjaan sebagai buruh industry atau bangunan yang

pendapatannya berkisar sekitar Rp890.000,00. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat masih sering terlambat bahkan sering mengalami tunggakan.

Kecamatan Kota Kudus dipilih sebagai lokus dalam penelitian ini dikarenakan masih tingginya tunggakan PBB di Kecamatan Kota Kudus, realisasi penerimaan PBB yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, serta Kecamatan Kota Kudus merupakan Kecamatan yang tingkat pelunasan PBB nya paling rendah yaitu hanya satu desa yang selalu melakukan pelunasan dengan tepat waktu hal tersebut dikarenakan pembayarannya di tanggung terlebih dahulu oleh perangkat desa terkait.

## **B. Tujuan**

1. Mengetahui pengaruh komunikasi antar pribadi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Kota Kudus.
2. Mengetahui pengaruh tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Kota Kudus.
3. Mengetahui pengaruh komunikasi antar pribadi dan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Kota
4. Menguji Hipotesis

## **C. Teori**

### **C.1 Partisipasi Masyarakat**

Membayar PBB merupakan sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat, dikarenakan sebagai

suatu bentuk partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Siagian (dalam Khairuddin, 2000:125) mengatakan bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang nantinya akan melaksanakan berbagai kegiatan yang ada didalam pembangunan itu sendiri serta masyarakat yang memegang peranan sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan.

Partisipasi sendiri menurut Hoofsteede adalah ambil bagian dalam suatu tahap atau proses didalam pembangunan. Sedangkan menurut Keith Davis partisipasi sendiri adalah adanya keterlibatan mental dan emosional yang menuntut adanya kontribusi dan tanggung jawab terhadap kepentingan suatu kelompok.

Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan mental yang berupa pemikiran mereka terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, kontribusi masyarakat baik itu berupa uang, inisiatif, ataupun inovasi terkait dengan PBB, serta tanggung jawab wajib pajak terkait pembayaran dan sanksi keterlambatan PBB.

Dalam kaitannya dengan partisipasi, digunakan tiga teori tentang faktor yang mempengaruhi dan menentukan gagal atau berhasilnya suatu partisipasi masyarakat yaitu menurut Tjokroamidjojo, Santoso Sastropetro dan Slamet.

Menurut Tjokroamidjojo (1994:226-228) tiga hal penting yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat yaitu: masalah kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Sedangkan menurut Santoso Sastropetro (1986:44) ada lima unsur penting yang menentukan gagalnya dan berhasilnya partisipasi yaitu : komunikasi yang efektif, perubahan sikap dan tingkah laku, kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan, antusiasme yang menumbuhkan spontanitas, serta adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Sedangkan menurut Slamet (1993:137) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan mata pencaharian.

Ketiga teori di atas, digunakan untuk melakukan penarikan pada variabel komunikasi antar pribadi dan tingkat sosial ekonomi.

### **C.2 Komunikasi Antar Pribadi**

Menurut pendapat Mardikanto (1998:52), komunikasi yang efektif dapat menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang diupayakan oleh pemerintah (penguasa). Didalam komunikasi terdapat suatu proses di mana proses tersebut pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan).

Untuk lebih memahami komunikasi antar pribadi, Hardjana (2007:84) mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim

dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa umpan balik. Komunikasi antar pribadi ini memiliki kelebihan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan.

Akan tetapi terkadang yang menjadi permasalahan di dalam komunikasi antar pribadi adalah lebih kepada effect dan penerimaan. Terkadang belum terdapat timbal balik dari penerima pesan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh pengirim pesan, sehingga belum ada umpan balik diantara keduanya.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Hardjana (dalam Suranto, 2011:77) komunikasi antar pribadi dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, kemudian pesan dapat ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh penerima pesan, dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan untuk hal tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan di sini, tiga persyaratan utama komunikasi antar pribadi dikatakan efektif adalah adanya pengertian yang sama terhadap makna pesan, pelaksanaan pesan secara sukarela, dan meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi.

### C.3 Tingkat Sosial Ekonomi

Menurut Soerjono Soekanto (2003:256) tingkat sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi si pembawa statusnya, seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan.

Dengan melihat definisi tingkat sosial ekonomi di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat sosial ekonomi adalah suatu kondisi masyarakat yang di tinjau dari segi kemampuan ekonomi maupun dari segi sosial ekonomi yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, hal tersebut dikarenakan merupakan suatu kesatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari.

Bahkan Suhariadi (dalam Jurnal SOSIAL, Vol. 9 No.2, September 2008, hal.19) mengatakan bahwa tingkat sosial ekonomi seseorang adalah suatu posisi atau jenjang yang dimiliki dalam hidup dan penghidupannya dalam masyarakat yang meliputi: tingkat pendidikan yang dicapai, status pekerjaan yang di miliki, tingkat pendapatan dan konsumsi, tingkat atau pola pemukiman dan pemilikan barang, sarana dan prasarana, serta mobilitas sosial dan lain sebagainya.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, Friedmen (2004:45) mengungkapkan terkait faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi seseorang yaitu pendidikan,

pekerjaan, keadaan ekonomi, latar belakang budaya, dan pendapatan.

Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa dalam penelitian ini, tingkat sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan.

Menurut Soerjono Soekanto (2003:258), pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin) dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi. Tingkat pendidikan seseorang ini dapat di ukur dari pendidikan formal dan nonformal yang diikuti oleh masyarakat sesuai dengan isi UU No. 20 Tahun 2003.

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan *income* / uang guna menyokong atau menghidupi keluarga dalam rangka menunjang ekonomi keluarga. Pekerjaan juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau imbalan selama waktu dan hasil yang tertentu pula. Menurut Haliti Thoha dan Purnomo (1987:17) pekerjaan terbagi menjadi 2 macam yaitu pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan.

Sedangkan pendapatan menurut Pitomo yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan

jalan di nilai sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat itu. (Sumardi dan Evers, 1982:20)

Berdasarkan penggolongan, BPS membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu :

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan
2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan
3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000,00 per bulan.

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat sosial ekonomi seseorang. Apabila seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat sosial ekonominya juga tinggi.

Pendapatan seseorang dapat diukur dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. (Haliti Thoha dan Purnomo, 1987:30)

## **D. Metode**

### **D.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif, yaitu menguji hubungan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti.

### **D.2 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB pribadi yang ada di Kecamatan Kota Kudus yang berjumlah 25.565 (data sampai bulan Agustus 2011) yang tersebar di 25 kelurahan dan desa.

### **D.3 Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 orang, yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus Frank Lynch. Yang mana menggunakan teknik *systematic sampling*, dimana merupakan alternatif lain pengambilan sampel yang sangat bermanfaat untuk pengambilan sampel dari populasi yang sangat besar. Pengambilan sampel secara sistematis adalah suatu metode di mana hanya unsur pertama dari sampel yang dipilih secara acak sedang unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu.

### **D.4 Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Interview atau wawancara  
Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui apa yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi serta dapat mengenal responden secara lebih mendalam.
2. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa

pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dapat dikirim.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Kota Kudus tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat menerima dengan baik adanya kewajiban membayar PBB, walaupun masih merasa terbebani dengan kewajiban tersebut, masyarakat juga memiliki inisiatif dalam menyediakan dana untuk membayar PBB sekaligus berinisiatif bekerjasama dengan petugas pajak walaupun masih terdapat wajib pajak yang sering terlambat membayar PBB, serta kesediaan wajib pajak dalam menerima adanya sanksi keterlambatan pembayaran PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut senada dengan pendapat Siagian (dalam Khairuddin, 2000:125) yang mengungkapkan bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, karena itulah pada akhirnya masyarakatlah yang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat memiliki peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:10) kepatuhan wajib pajak itu merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi masyarakat di Kecamatan Kota Kudus tergolong baik. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat sudah memiliki daya tanggap yang baik terhadap informasi yang diberikan, masyarakat merasakan adanya perubahan tindakan setelah menerima informasi, masyarakat juga sangat intens dalam bertukar informasi dengan petugas pajak terkait PBB sehingga dapat terjalin hubungan antar pribadi yang sangat baik. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu masyarakat masih sangat kesulitan dalam memahami informasi dikarenakan jarang menghadiri sosialisasi, serta masyarakat masih sering mengalami mis komunikasi dikarenakan masyarakat kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan petugas pajak. Komunikasi antar pribadi ini memiliki pengaruh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardikanto (1998:52), komunikasi yang efektif dapat menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang diupayakan oleh pemerintah (penguasa). Komunikasi yang efektif juga dapat memelihara partisipasi masyarakat tersebut secara berkelanjutan demi perbaikan mutu hidup yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat sosial ekonomi masyarakat di

Kecamatan Kota Kudus tergolong sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah memiliki pendidikan formal yang tinggi yaitu mayoritas adalah SLTA dan Akademi, selain itu masyarakat juga sudah memiliki pekerjaan tetap yang mana pendapatannya dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu mayoritas wajib pajak memiliki tanggungan keluarga yang banyak yaitu lebih dari tiga orang sehingga pastinya akan sangat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga masyarakat.

Variabel komunikasi antar pribadi memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Dari hasil perhitungan didapat nilai  $Z$  hitung ( $Z_o$ ) >  $Z$  tabel ( $Z_t$ ) yaitu  $5,368 > 1,96$ . Sedangkan besar pengaruhnya diperoleh dari hasil perhitungan nilai  $KD$  yaitu sebesar  $13,83\%$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang diuji mempunyai **hubungan positif dan signifikan**. Sehingga hipotesis antara komunikasi antar pribadi dan partisipasi masyarakat **dapat diterima**. Variabel tingkat sosial ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Dari hasil perhitungan didapat nilai  $Z$  hitung ( $Z_o$ ) >  $Z$  tabel ( $Z_t$ ) yaitu  $5,757 > 1,96$ . Sedangkan besar pengaruhnya diperoleh dari hasil perhitungan nilai  $KD$  yaitu sebesar  $15,92\%$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang diuji mempunyai **hubungan positif dan signifikan**. Sehingga hipotesis antara tingkat sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat **dapat diterima**.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Kendall Wtest dapat disimpulkan bahwa antara komunikasi antar pribadi ( $X_1$ ) dan tingkat sosial ekonomi ( $X_2$ ) dengan partisipasi masyarakat ( $Y$ ) ada **korelasi positif dan signifikan dengan demikian hipotesis dapat diterima**. Variabel partisipasi masyarakat dipengaruhi sebesar  $27,77\%$  dari variabel komunikasi antar pribadi ( $X_1$ ) dan tingkat sosial ekonomi ( $X_2$ ). Sedangkan sisanya  $72,23\%$  dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel komunikasi antar pribadi dan tingkat sosial ekonomi yaitu sikap, kepemimpinan, antusiasme, dan lain-lain.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kota Kudus menunjukkan hasil partisipasi masyarakat yang tergolong tinggi yaitu sebanyak 70 orang atau sebesar  $72,91\%$ . Ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima dengan baik adanya kewajiban membayar PBB, sehingga memiliki inisiatif dalam menyediakan dana dan bekerjasama dengan petugas pajak, serta bersedia menerima adanya sanksi keterlambatan apabila masyarakat terlambat membayar PBB.

Komunikasi antarpribadi masyarakat di Kecamatan Kota Kudus menunjukkan hasil yang yaitu tergolong baik sebanyak 70 orang atau sebesar  $72,91\%$ . Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya tanggap yang baik terhadap informasi yang diterima sehingga menyebabkan adanya perubahan tindakan. Di samping itu

intensitas masyarakat bertukar informasi dengan petugas pajak juga sangat baik, sehingga dapat terjalin hubungan antarpribadi yang baik.

Tingkat sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kota Kudus menunjukkan hasil yang tergolong sangat tinggi yaitu sebanyak 69 orang atau sebesar 71,87%. Ini dapat ditunjukkan dengan melihat pendidikan formal masyarakat yang sudah tinggi yaitu SLTA dan Akademi, serta masyarakat sudah memiliki pekerjaan tetap yang pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan pada hubungan antar variabel komunikasi antar pribadi dan variabel tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB yaitu :

Variabel komunikasi antar pribadi mempunyai hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang diuji mempunyai hubungan **positif dan signifikan** antara komunikasi antar pribadi dengan partisipasi masyarakat yang hipotesisnya **dapat diterima**.

Variabel tingkat sosial ekonomi mempunyai hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang diuji mempunyai hubungan **positif dan signifikan** antara tingkat sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang hipotesisnya **dapat diterima**.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Kendall Wtest dapat disimpulkan bahwa

antara komunikasi antar pribadi (X1) dan tingkat sosial ekonomi (X2) terhadap partisipasi masyarakat (Y) dalam membayar PBB ada **korelasi positif dan signifikan dengan demikian hipotesis dapat diterima**.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil dalam penelitian ini, maka dapat direkomendasikan kepada wajib pajak sekaligus petugas pajak di Kecamatan Kota Kudus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dianggap masih belum baik sesuai dengan hasil penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Partisipasi masyarakat

Permasalahan partisipasi masyarakat sangat perlu diperhatikan di karenakan masih banyak masyarakat yang terlambat dalam membayar PBB. Maka akan lebih baik apabila petugas pajak lebih meningkatkan pelaksanaan penyuluhan sampai pada tingkat desa, sebab rata-rata wajib pajak masih kurang memiliki pengetahuan tentang PBB itu sendiri. Serta memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang sering terlambat membayar pajak sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

### b. Komunikasi antar pribadi

Dalam hal berkomunikasi kaitannya dengan pemahaman wajib pajak, akan lebih baik apabila wajib pajak menyediakan waktu untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan

petugas pajak atau dengan langsung mendatangi perangkat desa untuk mendapatkan penjelasan lebih terkait informasi yang tidak mereka pahami. Dalam hal ini, petugas pajak dapat membantu wajib pajak dengan memberikan buku panduan mengenai PBB supaya masyarakat lebih mengerti dan paham akan informasi yang disampaikan saat penyuluhan berlangsung.

- c. Tingkat sosial ekonomi  
Untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang memiliki tanggungan keluarga yang banyak, akan lebih baik apabila perangkat desa sekitar baik itu RT/RW melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki tanggungan keluarga yang besar, untuk diberikan pelatihan berwirausaha sehingga masyarakat dapat mempunyai tambahan pendapatan dengan berwirausaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hardjana, Agus M. 2007. *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: PT. Liberty.

- Mardikanto, Totok. 1998. *Komunikasi Pembangunan*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Sastropoetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Thoah, Haliti dan Purnomo. 1987. *Hubungan Kerja Majikan dan Buruh*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung